

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 *Legitimation Theory* (Teori Legitimasi)**

*Legitimation Theory* dikemukakan pertama kali oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975. Dowling dan Pfeffer menyatakan bahwa legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan agar mampu untuk dapat survive dan bertahan hidup. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu perusahaan bergantung pada kemampuannya untuk menyampaikan tujuan yang diinginkan untuk mendistribusikan manfaat baik dalam bidang ekonomi, sosial, atau politik kepada masyarakat dimana ia memperoleh kekuatannya.

*Legitimation Theory* merupakan penjelasan teoritis yang paling banyak digunakan untuk laporan sukarela, seperti laporan terintegrasi (Emeseh, & Songi, 1981). *Legitimation Theory* didasarkan pada adanya kontak sosial antara sebuah institusi dengan masyarakat, dimana diperlukan sebuah tujuan institusi yang kongruen dengan nilai yang ada didalam sebuah masyarakat. Tindakan sebuah institusi harus mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat.

Sehingga *Legitimation Theory* dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kontrak atau kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat

atau lingkungan sekitar. Bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan operasional perusahaan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dimasyarakat serta usaha dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atau pembangunan kesejahteraan dan kehidupan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Bentuk kegiatan penyesuaian yang banyak dilakukan perusahaan seperti program CSR yang dicakup dalam Laporan yang terintegritas (*Integrated Reporting*) berisi laporan keuangan dan laporan non keuangan dilakukan dalam usaha perusahaan mengayomi lingkungan sekitarnya sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

Selain juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi perusahaan yaitu membuat transparansi juga sebagai sarana mengambil simpati masyarakat dan media promosi bagi perusahaan, disamping pembangunan kesejahteraan dan sosial masyarakat sebagai tujuan utama. Dengan kata lain, perusahaan yang semakin banyak mengungkapkan *Integrated Reporting* maka semakin kecil kemungkinan melakukan tindakan agresivitas pajak yang tentunya akan merugikan masyarakat dan dapat merugikan perusahaan.

### **2.1.2 Stakeholders Theory**

*Stakeholders Theory* ini ditemukan pertama kali Oleh Edward Freeman pada tahun 1984. Edward Freeman menyatakan bahwa *Stakeholders Theory* merupakan pandangan kapitalisme yang menekankan hubungan antar pelaku bisnis dan pelanggannya seperti pemasok, karyawan, investor, komunitas, dan

pihak lain yang berkepentingan dalam organisasi. Teori ini juga berpendapat bahwa perusahaan harus menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham saja (Freeman, 1984).

Teori ini fokus pada cara perusahaan mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan (Yulyan et al, 2021). Melalui adanya teori tersebut menjelaskan bahwa pada suatu perusahaan perlu mendorong adanya keterbukaan dan komunikasi antara pihak korporasi atau perusahaan (manajemen perusahaan) dengan para pemegang saham perusahaan (Dani & Purwanti, 2021).

### **2.1.3 Ruang Lingkup Pengelolaan Perusahaan Publik**

Perusahaan publik merupakan jenis perusahaan yang sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal dan dimiliki oleh investor. Perusahaan publik memiliki kewajiban untuk memberikan laporan keuangan dan informasi lainnya secara teratur kepada publik, seperti laporan keuangan tahunan, laporan keuangan kuartalan, dan pengungkapan material lainnya. Hal ini memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan memperjual belikan sahamnya perusahaan publik dapat memperluas usaha dan meningkatkan kinerja perusahaan serta perusahaan publik dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memperluas jaringan bisnis. Ruang lingkup perusahaan publik mencakup beberapa aspek operasi, kepemilikan, dan pengaruh perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal. Maka

bagian dari ruang lingkup perusahaan publik meliputi struktur kepemilikan, kinerja keuangan, regulasi dan kebijakan pasar modal, analisis resiko, dampak sosial dan lingkungan, kepatuhan perusahaan, dan inovasi pengembangan produk.

Terdapat beberapa jenis sektor perusahaan yang termasuk ke dalam perusahaan publik antara lain perusahaan sektor jasa yaitu perusahaan yang menyediakan layanan jasa, perusahaan sektor pertambangan yaitu perusahaan yang mengelola sumber daya alam, perusahaan sektor properti yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan properti, perusahaan sektor farmasi yaitu perusahaan yang mengelola obat-obatan, perusahaan sektor teknologi yaitu perusahaan yang bergerak dibidang teknologi, perusahaan sektor keuangan yaitu perusahaan yang menyediakan layanan keuangan, perusahaan sektor makanan dan minuman yaitu perusahaan yang memproduksi dan menjual makanan dan minuman, perusahaan sektor energi yaitu perusahaan yang mengelola sumber energi, perusahaan sektor transportasi yaitu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, dan perusahaan sektor manufaktur yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri.

Pada tahun 2021 Bursa Efek Indonesia resmi mengganti klasifikasi industri yang digunakan, sebelumnya Bursa Efek Indonesia menggunakan *Jakarta Stock Industrial Classification (JASICA)* sebagai klasifikasi industri. Pada tanggal 25 Januari 2021 Bursa Efek Indonesia resmi menggantinya menjadi *IDX Industrial Classification (IDX-IC)* memiliki 12 sektor salah satunya yaitu *Consumer Non Cyclical*.

Sektor *Consumer Non Cyclicals* atau disebut barang konsumen non primer adalah industri yang memproduksi dan mendistribusikan produk yang akan mengalami pertumbuhan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan, menurunnya ekonomi tentu berdampak pada menurunnya penjualan di pasar sehingga kinerja perusahaan juga akan ikut menurun, begitu juga sebaliknya jika pendapatan masyarakat meningkat maka akan meningkat juga jumlah kebutuhan terhadap *Consumer Non Cyclicals* (Dewi, 2018). Selain itu, Sektor *Consumer Non Cyclicals* mempunyai peluang masa depan yang baik karena sektor ini tidak berpengaruh pada kondisi ekonomi yang buruk dan barang yang ditawarkan juga merupakan barang-barang primer yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat, Sektor *Consumer Non Cyclicals* bersifat defensif dan mampu bertahan saat terjadi krisis. (Utami, 2020).

Dalam sektor *Consumer Non Cyclicals* salah satunya meliputi subsektor *food and beverage*, Sub Sektor *food and beverage* merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri makanan dan minuman. Di Indonesia perusahaan *food and beverage* sangat berkembang pesat, dilihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode ke periode semakin meningkat karena memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

## **2.1.4 Ukuran Kantor Akuntan Publik**

### **2.1.4.1 Pengertian Ukuran Kantor Akuntan Publik**

Kantor Akuntan Publik merupakan sebuah lembaga yang menyediakan jasa-jasa akuntansi dan audit kepada publik, biasanya terdiri dari sekelompok akuntan publik yang memiliki lisensi dan keahlian dalam bidang akuntansi, audit, perpajakan dan konsultasi bisnis.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011, Kantor Akuntan Publik yaitu badan usaha yang berbentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Republik Indonesia melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia.

Arens, Elder & Beasley, yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2015:29) menyatakan bahwa :

“Ukuran Kantor Akuntan Publik merupakan ukuran yang menentukan besar kecilnya suatu KAP. Ukuran KAP dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *big four*, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang. Sedangkan ukuran KAP dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *big four*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang .”

Menurut SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik), (2013) pengertian Kantor Akuntan Publik yaitu suatu organisasi yang melaksanakan jasa profesional yang dicakup oleh Standar Profesional Akuntansi Publik dan meliputi partner, dan staf profesional.

Sedangkan menurut Ghani et.al, (2018) KAP berukuran besar biasanya peduli dengan reputasi mereka karena mereka bekerja dengan perusahaan besar yang mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan mereka dan pastinya mereka memiliki pengalaman dalam menghadapi perusahaan dari berbagai wilayah dan kultur.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik merupakan suatu organisasi yang telah memiliki izin sesuai UU, besar kecilnya ukuran KAP yang membedakannya adalah jumlah klien, bekerja sama atau tidak dengan *big four*, dan jumlah anggota yang dimiliki. Semakin besar kantor akuntan publik maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan.

#### **2.1.4.2 Kategori Ukuran Kantor Akuntan Publik**

Berdasarkan ukurannya, KAP dibedakan menjadi dua yaitu berukuran besar (*Big accounting firm*), dan KAP berukuran kecil (*non big accounting firm*) (Ahmad & Sari, 2017) .

Menurut Arens et al. (2012:32), kategori ukuran Kantor Akuntan Publik secara internasional dibedakan menjadi empat bagian adalah sebagai berikut:

1. Kantor Internasional Empat Besar (*Big Four*). Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional "*Big Four*". Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor "*Big Four*" mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga.
2. Kantor Nasional. Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor "*Big Four*" dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional.
3. Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar. Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh.
4. Kantor Lokal Kecil. Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya."

Dalam Buku Direktori IAI (2018), IAI mengklasifikasikan KAP yang beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu:

1. KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing, dan
2. KAP yang tidak melakukan kerjasama dengan KAP asing

Undang-undang Akuntan Publik No.5 tahun 2011 BAB IV Pasal 17 Tenaga kerja Profesional Asing yaitu menyatakan bahwa :

1. KAP yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asing harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
2. Komposisi tenaga kerja profesional asing yang dipekerjakan pada KAP paling banyak satu per sepuluh dari seluruh tenaga kerja profesional untuk masing-masing tingkat jabatan pada KAP yang bersangkutan.

Undang-undang Akuntan Publik bagian kedua tentang Kerja sama Kantor Akuntan Publik dengan Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing Pasal 35 menyatakan bahwa :



1. KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA.
2. KAP yang melakukan nama KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan nama KAP mendapat persetujuan Menteri.
3. Kerjasama antara KAP dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat :
  - a. Bidang jasa audit atas informasi keuangan historis
  - b. Penggunaan metodologi yang disepakati bersama antara KAPA atau OAA dengan KAP.
  - c. Bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OAA, dan
  - d. Kerja sama bersifat berkelanjutan.
4. Persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah KAP mengajukan permohonan tertulis kepada menteri dengan syarat :
  - a. KAPA atau OAA telah terdaftar pada menteri, dan.
  - b. KAPA atau OAA tidak sedang melakukan kerja sama dengan KAP lain.
5. Pencantuman nama oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan satu nama KAPA atau OAA.
6. KAPA atau OAA yang namanya sudah dicantumkan oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat digunakan oleh KAP lain.

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kategori ukuran KAP di Indonesia, jika dihubungkan dengan keberadaan KAP internasional, maka ukuran KAP dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP Internasional *big four*, yaitu KAP asing *big four* yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP asing *big four*, yakni Deloitte, Ernst & Young, KPMG, and Pricewaterhousecoopers.
2. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional *non big four*, yaitu KAP asing *non big four* yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP

asing *non big four*, yakni Kreston International, PKF International, dan sebagainya.

3. KAP Nasional, yaitu KAP Indonesia yang berdiri sendiri, terletak/berpusat di kota besar di Indonesia dan KAP tersebut membuka cabang di kota-kota besar utama di Indonesia.
4. KAP Regional dan Lokal Besar, yaitu KAP di Indonesia yang berdiri sendiri dan pada umumnya terpusat di suatu wilayah. Sebagian KAP di Indonesia merupakan KAP regional dan lokal besar, terutama yang terpusat di Pulau Jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkauan wilayahnya, dan beberapa dari yang lainnya memiliki beberapa kantor cabang di daerah lain tetapi bukan di kota-kota besar di Indonesia.
5. KAP Lokal Kecil, yaitu KAP yang berdiri sendiri, tidak membuka cabang, dan memiliki kurang dari 25 orang tenaga kerja profesional.

Hal tersebut juga bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan dengan tingkat kebutuhan yang besar, pastinya akan membutuhkan jasa KAP dengan ukuran yang besar. Karena perusahaan besar mengungkap lebih banyak informasi dan tuntutan pelaporan keuangan perusahaan dengan lebih rinci, maka membutuhkan KAP yang kompeten dalam mendukung upaya tersebut. Pertimbangan KAP seperti *big four* KAP dengan kapabilitas yang mencukupi diharapkan akan membuat kualitas laporan keuangan perusahaan menjadi semakin baik.

Indikator Ukuran KAP dapat diukur dengan dilakukan berdasarkan kategori internasional, jumlah klien yang dilayani oleh suatu KAP, jumlah anggota, dan total pendapatan yang diperoleh.

#### **2.1.4.3 Klasifikasi Kantor Akuntan Publik di Indonesia**

Klasifikasi KAP di Indonesia Berdasarkan ukurannya, KAP dibedakan menjadi dua, yaitu KAP *big four* dan KAP *non-big four*. KAP *big four* terdiri dari Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young, dan KPMG KAP *non-big four* adalah KAP lainnya. Selain keempat KAP *big four*. KAP *big four* memiliki afiliasi di Indonesia. ([www.accountingtoday.com](http://www.accountingtoday.com)).

Berdasarkan IAPI (2015) ada empat KAP besar di Indonesia dalam Direktori KAP yang berafiliasi dengan *The Big Four Auditors* yaitu:

1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan E&Y.
2. KAP Osman Bing Satrio berafiliasi dengan Deloitte.
3. KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja berafiliasi dengan KPMG4.KAP
4. Haryanto Sahari berafiliasi dengan PwC.

Keempat KAP tersebut menjadi besar karena pada dasarnya mereka merupakan gabungan dari beberapa firma. Bahwa EY di Singapura, memiliki entitas terpisah dengan EY di Indonesia. Meskipun memiliki kesamaan nama, mereka memiliki kebijakan dan struktur tersendiri yang tidak saling terkait satu sama lain. Agar dapat beroperasi di Indonesia, keempat KAP tersebut harus bekerja sama atau berafiliasi dengan KAP yang berada di Indonesia.

#### **2.1.4.5 Faktor yang dapat Mengubah Ukuran Kantor Akuntan Publik**

Pergantian kantor akuntan publik yang bersifat wajib terjadi karena peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentang pergantian KAP di Indonesia yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 yang membatasi sebuah KAP memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan paling lama lima tahun buku berturut-turut, dan akuntan publik memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan paling lama tiga tahun berturut-turut. Peraturan ini kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Peraturan ini membatasi pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.

Selain dari pergantian KAP terdapat beberapa faktor yang dapat mengubah Ukuran Kantor Akuntan Publik yaitu sebagai berikut :

1. Pertumbuhan bisnis, yaitu pada saat kantor akuntan publik berhasil mendapatkan klien baru atau mengembangkan layanan baru, ukuran kantor dapat.
2. Aliansi dan merger, ketika kantor akuntan publik bergabung dengan menjalin aliansi dengan kantor akuntan publik lain, ukuran kantor dapat bertambah karena perpaduan sumber daya dan klien yang dimiliki.

3. Perubahan struktur organisasi, jika kantor akuntan publik mengubah struktur organisasi misalnya dengan menambah divisi atau departemen baru sehingga ukuran dapat berubah.
4. Pemutusan hubungan kerja, jika kantor akuntan publik kehilangan klien atau melakukan pemutusan hubungan dengan klien, maka ukuran kantor akan mengecil karena berkurangnya kebutuhan sumber daya.
5. Faktor ekonomi, perubahan kondisi ekonomi seperti perlambatan ekonomi atau krisis keuangan dapat mempengaruhi permintaan akan pelayanan akuntansi dan menyebabkan perubahan ukuran KAP.

Dari adanya faktor-faktor yang dapat mengubah ukuran KAP di atas, maka kantor akuntan publik di Indonesia harus dapat mengelola ukuran KAP dengan baik dan beradaptasi dengan lingkungan yang terjadi.

## **2.1.5 Ukuran Perusahaan**

### **2.1.5.1 Pengertian Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan memiliki peran penting dalam menentukan posisi perusahaan di pasar, dan dapat mempengaruhi keputusan investasi dan strategi bisnis perusahaan. Perusahaan yang dianggap besar memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar, sedangkan perusahaan kecil lebih fleksibel dan dapat beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar.

Menurut Hartono (2015:254) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

“Besarnya kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besarnya harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma aktiva”.

Jogiyanto Hartono (2013:232) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

“Ukuran Perusahaan adalah suatu skala dimana dapat mengklasifikasikan besarnya kecilnya perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*), penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan”.

Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari pada perusahaan kecil, karena pada perusahaan besar akan menghadapi resiko yang lebih besar. Perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan untuk mengungkapkan laporan yang lengkap mencakup *finansial* maupun *non finansial*, ukuran perusahaan juga dapat menjadi suatu penentu perusahaan untuk mendapatkan dana dalam pasar modal (Novaridha, 2017).

Machfoedz dalam Jesslyn (2018) mengatakan bahwa Pada dasarnya hanya terdapat tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

#### **2.1.5.2 Kriteria Umum Ukuran Perusahaan**

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan dibagi menjadi empat kategori yaitu :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari perusahaan menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pengelompokan ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun

2008 pasal 6 adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Assets (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	51 Juta sampai 500 Juta	>301 Juta-2,5 M
Usaha Menengah	>501 Juta- 10M	2,6 M-50 M
Usaha Besar	>11M	>51 M

Sumber : UU No.20 Tahun 2008

**Tabel 2.2**  
**Ukuran perusahaan berdasarkan Jumlah Karyawan**

Ukuran Perusahaan	Jumlah Karyawan
Usaha Mikro	1-10 Karyawan
Usaha Kecil	11-49 Karyawan
Usaha Menengah	50-249 Karyawan
Usaha Besar	>250 Karyawan

Sumber Website : bps.co.id

**Tabel 2.3**  
**Ukuran Perusahaan berdasarkan Nilai Pasar**

Ukuran Perusahaan	Nilai Pasar
Usaha Mikro	<50 Juta
Usaha Kecil	51 Juta-1 Miliar
Usaha Menengah	> 1 Miliar-10 Miliar
Usaha Besar	>10 Miliar

Sumber : bps.co.id

### 2.1.5.3 Jenis-jenis Badan Hukum Perusahaan

Menurut Sukirno (2011:190) menjelaskan bahwa organisasi perusahaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk organisasi yang pokok, yaitu :

- a. Perusahaan Perseorangan  
Perusahaan perseorangan merupakan usaha yang dimiliki oleh salah satu orang sehingga pemiliknya memiliki kebebasan yang tidak



terbatas. Ia sepenuhnya menguasai perusahaan dan dapat melakukan apapun tindakan yang dianggap untuk menguntungkan perusahaannya.

b. Firma

Firma merupakan organisasi yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka sepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Modal perusahaan berasal dari para anggotanya, ada kalanya mereka juga meminjam modal dari lembaga-lembaga lain

c. Perseroan Terbatas

Perusahaan-perusahaan besar kebanyakan berbentuk perseroan terbatas. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham.

Menurut Hery (2016:2) berdasarkan dari jenis usaha produk yang dijual, dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur (*Manufacturing*)

Perusahaan jenis ini terlebih dahulu mengubah (merakit) input atau bahan mentah (*raw material*) menjadi output atau barang jadi (*finished goods final good*), baru kemudian dijual kepada para pelanggan (distributor). Contoh perusahaan manufaktur, diantaranya adalah: perusahaan perakitan mobil, komputer, perusahaan pembuat (pabrik) obat, tas, sepatu, pabrik penghasil keramik, dan sebagainya.

2. Perusahaan Dagang (*Merchandising Business*)

Perusahaan jenis ini menjual produk (barang jadi), akan tetapi perusahaan tidak membuat/menghasilkan sendiri produk yang akan dijualnya melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Contoh perusahaan dagang diantaranya adalah: Indomaret, AlfaMart, Carrefour, Gramedia, dan sebagainya.

3. Perusahaan jasa (*service business*)

Perusahaan jenis ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada pelanggan. Contoh perusahaan jasa diantaranya adalah: perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi (jasa angkut), pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan sebagainya.

#### 2.1.5.4 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Kusumawardhani (2012:24):

“Metode ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan investor dalam menilai aset maupun kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset dan total penjualan (net sales) yang dimiliki perusahaan.”

Menurut Setiyadi (2007), ukuran perusahaan juga dapat ditentukan oleh beberapa indikator sebagai berikut:

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.
3. Total hutang, merupakan jumlah hutang perusahaan pada periode tertentu.
4. Total aktiva, yang merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

Menurut Hasna & Sawir (2015) dalam (Rahayuningsih & Pujiono, 2019) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan dapat menjadi penentu kemudahan perusahaan untuk mendapatkan dana dalam pasar modal. Perusahaan yang besar bisa memilih bentuk pendanaan dari berbagai utang yang memiliki keuntungan lebih spesial.

Beberapa faktor yang umumnya digunakan dalam pengukuran ukuran perusahaan antara lain:

Menurut Jogiyo Hartono (2013:282) ukuran perusahaan diukur melalui :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

## **2.1.6 Komite Audit**

### **2.1.6.1 Pengertian Komite Audit**

Komite audit memiliki peran penting untuk memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan tersebut mematuhi aturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Arens et al (2010:104), pengertian komite audit yaitu :

*“Audit committees is a selected number of members of a company’s board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not a part of company management.”*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) yaitu :

“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Adanya komite audit diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam meningkatkan pengawasan internal yang ada di Perusahaan yaitu untuk membantu Dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya.”

Menurut POJK NOMOR 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa :

“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit setidaknya terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan dan diketuai oleh komisaris independen.”

Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 menjelaskan bahwa :

“Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.”

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) (2015) mengemukakan pengertian komite audit, yaitu :

“Komite Audit merupakan Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan”

Hal tersebut menjelaskan bahwa secara umum komite audit terdiri dari tiga sampai tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Dan memiliki tujuan yaitu menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan.

Berdasarkan dari penjelasan mengenai komite audit tersebut maka dapat disimpulkan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris yang bekerja sama dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk memastikan efektivitas pengendalian internal, komite audit biasanya terdiri dari tiga sampai lima orang bahkan tujuh orang.

#### **2.1.6.2 Pembentukan Komite Audit**

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perusahaan yang membentuk Komite Audit yaitu perusahaan publik dan perusahaan BUMN karena ingin mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi perusahaannya kepada publik.

Berdasarkan dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-41/PM/2003, menyatakan bahwa :

1. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit;
2. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki pedoman kerja komite audit (*audit committee charter*);
3. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris;
4. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Dari keputusan tersebut komite audit dituntut harus bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang mendasari integritasnya. Sehingga adanya komite audit menjadi pihak yang menjembatani antara auditor eksternal dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan auditor internal.

#### **2.1.6.3 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Audit**

Tugas dan tanggung jawab komite audit yaitu penelaahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, penilaian atas pengendalian internal perusahaan, dan penelaahan sistem pelaporan eksternal serta penilaian kepatuhan terhadap peraturan. Oleh sebab itu adanya komite audit sangat penting untuk berlangsungnya suatu perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab komite audit pada sebuah perusahaan tidak pernah persis dengan perusahaan lainnya. Hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan skala, jenis usaha, kebutuhan domisili dari tiap perusahaan. Tetapi walaupun demikian tugas dan tanggung jawab komite audit tidak boleh menyimpang dari tugas dan tanggung jawab *Board of commissioner*.

Menurut keputusan menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002, Tugas komite audit yaitu sebagai berikut :

1. Menilai pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan dan pelaksanaannya.
3. Memastikan bahwa terdapat prosedur yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris atau dewan pengawas.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh dewan komisaris atau dewan pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban komisaris dewan pengawas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Komite Audit yaitu untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melakukan tugas yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

Sedangkan *Forum for Corporate Government in Indonesia (FCGI)* menyatakan bahwa Komite Audit mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh dalam hal sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan  
Komite Audit melaksanakan pengawasan independen dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya.
2. Pengawasan Kontrol (*Corporate Control*)  
Komite audit memberikan pengawasan independen atas masalah yang berpotensi mengandung risiko.
3. Tata Kelola Perusahaan  
Komite audit yang melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah berjalan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, Tanggung Jawab Komite audit yaitu untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan

undang-undang yang berlaku, sudah melakukan pengawasan secara efektif, dan melaksanakan tugasnya.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menyebutkan :

“Komite Audit memiliki kewenangan mengakses secara penuh, bebas dan tak terbatas terhadap catatan, karyawan, dan, aset, serta sumber daya perusahaan dalam tugasnya serta berwenang untuk melakukan kerjasama dengan auditor internal.”

Dari pernyataan di atas terdapat Wewenang Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan.
3. Mengusahakan saran hukum dan saran profesional lainnya.
4. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman yang sesuai, apabila diperlukan.

Kewenangan komite audit ini dibatasi oleh fungsi komite audit yaitu sebagai alat bantu dewan komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun hanya menunggu rekomendasi dari pihak kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal yang spesifik yang sudah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris seperti mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus.

#### **2.1.6.4 Fungsi Komite Audit**

Ahmad dan Sari (2017) mengemukakan bahwa fungsi dari komite audit yang terdapat didalam suatu perusahaan adalah untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, sehingga pihak manajemen perusahaan tidak melakukan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan.

Menurut (Setiawan, 2013) Komite audit secara umum berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi, keuangan dan pengendalian internal. Bursa Efek Indonesia mewajibkan untuk para perusahaan yang tercatat untuk memiliki komite audit agar dalam menyelenggarakan pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi audit yaitu untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap aktivitas perusahaan agar meminimalisir terjadinya penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan dan agar pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik dan efektif.

#### **2.1.6.5 Tujuan dan Peran Komite Audit**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/2016 tujuan dibentuknya komite audit untuk membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris dalam memastikan efektifnya suatu sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Komite audit bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



Berdasarkan dengan Keputusan Menteri Nomor 117 tahun 2002 menyebutkan tujuan dibentuknya Komite Audit adalah untuk membantu Komisaris atau dewan pengawasan dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.

Menurut surat edaran Bapepam tahun 2003 tujuan membantu dewan komisaris yaitu untuk :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan disiplin dan pengendalian yang dapat membantu mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan,
3. Meningkatkan efektivitas fungsi *audit internal* maupun audit eksternal,
4. Mengidentifikasi hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Dan mengacu pada *Securities and Exchange Commission (SEC)*, Komite Audit memiliki tujuan yaitu mengawasi :

1. Integritas dari Laporan keuangan perusahaan.
2. Kualifikasi dan kemandirian auditor independensi atau auditor eksternal.
3. Kinerja dari auditor internal perusahaan dan auditor eksternal.
4. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dan kepada undang-undang.

Menurut Suryono dan Prastiwi (2011) Komite Audit dapat melakukan koordinasi dalam menjalankan pengawasan atas laporan dan pelaksanaan *corporate governance* perusahaan agar menjadi semakin baik. Komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan dalam proses pelaporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik atas kelayakan laporan keuangan, objektivitas laporan keuangan serta adanya pengendalian internal yang lebih baik di dalam perusahaan.

Hal ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap luas pengungkapan yang diperlukan para *stakeholders* untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Dalam menjalankan perannya, komite audit juga memiliki hak terbatas kepada direksi, auditor internal, auditor eksternal, dan semua informasi yang ada di perusahaan.

#### **2.1.6.6 Efektivitas Komite audit**

Berdasarkan peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 ditentukan bahwa

“komite audit harus diketahui oleh komisaris independen, dan sekurang-kurangnya salah satu anggotanya memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi atau keuangan. Hal ini dibuat dengan pertimbangan bahwa tugas komite audit sangat erat berhubungan dengan masalah akuntansi dalam proses pelaporan keuangan berhubungan dengan masalah akuntansi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, komite audit yang diketahui oleh seseorang yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi, akan meningkatkan efektifitas dari komite audit. Karena tanpa pengetahuan yang memadai dalam bidang akuntansi, maka diduga peran yang dijalankannya sebagai ketua komite audit akan tidak efektif.”

Agar suatu tata kelola perusahaan yang baik maka memiliki komite audit yang aktif sehingga diperlukannya untuk sering menyelenggarakan pertemuan antar dewan direksi. Dalam pertemuan pertemuan tersebut harus dihadiri oleh CEO, CFO, auditor internal, auditor eksternal, badan pengawas, direktur keuangan dan lain-lainnya yang memiliki kepentingan dalam membahas masalah yang terjadi dalam suatu perusahaan.

Komite audit yang efektif yaitu input (kualifikasi: komposisi), proses (wewenang, sumber daya, dan usaha) dan output (pelaporan keuangan, pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal). Komite yang independen yakni dengan tugas dan tanggung jawab, struktur organisasi dan

keanggotaan, sistem pelaporan, hubungan kerja dan penilaian kerja. hal tersebut karena pengaruh dari manajemen dan juga sumber daya yang mengerti proses pelaporan keuangan.

#### **2.1.6.7 Kompetensi Komite Audit**

Kompetensi Komite Audit menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang standar kompetensi auditor yaitu :

“Kompetensi auditor merupakan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan atau keahlian (*Skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik.”

Berdasarkan keputusan tersebut seorang auditor dapat dikatakan kompeten jika memiliki pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan sikap perilaku yang sesuai dengan peraturan yang ditentukan agar dapat melakukan tugasnya dengan baik.

#### **2.1.6.8 Independensi Komite Audit**

Keahlian komite audit di bidang akuntansi dan keuangan menjadikan komite audit mampu memahami manajemen risiko yang terjadi pada perusahaan, Dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan akan membuat proses pelaporan keuangan maupun non keuangan perusahaan menjadi termonitor dengan baik dan dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pihak

manajemen perusahaan sebagai *agen* dan pihak investor sebagai *principal* dengan menyajikan laporan yang transparan dan terintegritas.

Berdasarkan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* Independensi Komite Audit adalah :

*“Independence is the freedom from conditions that threaten the ability of the internal audited activity to carry out internal audit responsibilities in an unbiased manner,”*

Hal tersebut menjelaskan bahwa auditor tidak memihak kepada kepentingan siapapun sehingga auditor sangat penting untuk mempertahankan kebebasan berpendapat, melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam cara yang tidak bias.

Terdapat tiga jenis pengertian independensi dalam Peraturan No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan pedoman pelaksanaan Komite audit, lampiran ketua Bapepam NO. 29/PM/2000 yaitu :

1. Independensi dalam penampilan (*Independent In Appearance*) yaitu independensi yang selama bertugas selalu menghadapi keadaan yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan independensinya.
2. Independensi dalam kenyataan/fakta (*Independent In Fact*) yaitu sikap auditor dalam menjalankan tugasnya selalu mematuhi kode etik internal auditor dan *profesional framework of internal auditor*.
3. Independensi dalam pikiran (*Independent In Mind*) yaitu sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional audit.

Hal-hal tersebut menjelaskan bahwa independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak manapun, tidak memihak pihak manapun, serta tidak bergantung kepada orang lain. Independensi juga

memiliki arti kejujuran dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif. Independensi anggota komite audit dapat dilihat dari persyaratan keanggotaan komite audit.

#### **2.1.6.9 Pengukuran Komite Audit**

Jumlah anggota komite audit berkaitan dengan seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi perusahaan. Komite audit harus memiliki jumlah yang memadai untuk mengemban tanggung jawab pengendalian dan pengawasan aktivitas manajemen perusahaan. Ukuran komite yang lebih besar menyebabkan adanya pertukaran pengetahuan dan informasi. Jumlah anggota komite audit disesuaikan besar-kecilnya dengan perusahaan dan tanggung jawab.

Menurut POJK No.55 /POJK.04/2015 Pasal 4 Komite Audit paling sedikit terdiri dari tiga sampai lima orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Menurut Katoppo dan Nustini (2022) yaitu untuk dapat mengukur Komite audit menggunakan skala rasio dengan menggunakan rumus berikut :

$$KA = \sum \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

## **2.1.7 *Integrated Reporting***

### **2.1.7.1 Pengertian *Integrated Reporting***

Menurut *The International Integrated Reporting Committee (IIRC)* (2013)

merupakan :

“*Integrated Reporting (IR)* adalah suatu proses komunikasi informasi suatu organisasi kepada *stakeholders* tentang penciptaan nilai dari waktu ke waktu dan juga berperan sebagai komunikasi yang ringkas dan terintegrasi tentang bagaimana strategi, tata kelola, kinerja dan prospek suatu organisasi menghasilkan penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.”

Menurut IAPI (2022) *Integrated Reporting* merupakan suatu bentuk tentang strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek organisasi dalam lingkungan eksternalnya, mengarah pada penciptaan, preservasi, atau erosi nilai dalam jangka waktu pendek, menengah, panjang sesuai dengan panduan IR. Pelaporan terintegritas adalah laporan yang memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan menurut undang-undang dan pelaporan CSR/berkelanjutan.

Berdasarkan definisi diatas, secara umum *integrated reporting* merupakan penyajian laporan tahunan yang lengkap, terpadu dan terintegritas dimana dalam satu laporan tunggal terdapat informasi mengenai strategi, tata kelola, kinerja dan prospek yang berkaitan satu dengan lainnya.

### **2.1.7.2 Tujuan *Integrated Reporting***

Tujuan utama dari *Integrated Reporting* menurut *Integrated Reporting Framework (IRF)* (2013) adalah :

“Tujuan utama dari suatu yang terintegrasi laporan untuk menjelaskan kepada penyedia modal keuangan bagaimana sebuah organisasi

menciptakan, mempertahankan, atau mengikis nilai lembur. Oleh karena itu mengandung relevan informasi, baik finansial maupun lainnya”.

Menurut *International Integrated Reporting Council (IIRC) (2021)* tujuan *integrated reporting* di antaranya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas informasi yang tersedia bagi pemangku kepentingan untuk memungkinkan alokasi modal yang lebih efisien dan produktif
2. Mendorong pendekatan yang lebih konsisten dan efektif untuk pelaporan perusahaan yang dibangun di atas alur pelaporan yang berbeda dan mengkomunikasikan berbagai faktor yang secara material mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai dari waktu ke waktu.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan modal dasar yang luas (keuangan, manufaktur, intelektual, manusia sosial, rasional dan alam) juga meningkatkan keterkaitan mereka.
4. Mendukung pemikiran terpadu, pengambilan keputusan, dan tindakan yang berfokus pada penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

### **2.1.7.3 Konsep *Integrated Reporting***

Menurut Kustiani (2017) *integrated reporting* dibangun dengan konsep *capital steward* yang diartikan sebagai bentuk kontribusi untuk penciptaan *value* jangka panjang perusahaan. *International Integrated Reporting Council (IIRC)* mengelompokkan *capital* sebagai berikut :

- a. *Financial Capital* merupakan dana yang tersedia untuk digunakan organisasi dalam rangka produksi barang dan jasa yang diperoleh melalui pembiayaan, seperti utang, ekuitas/hibah atau dihasilkan melalui operasional atau investasi.
- b. *Manufacturing Capital* merupakan objek fisik yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.
- c. *Intellectual Capital* merupakan aset yang tak berwujud yang berbasis pengetahuan.
- d. *Human Capital* merupakan kompetensi, kapabilitas dalam berinovasi pegawai.

- e. *Social and Relationship Capital* merupakan hubungan yang dibangun baik didalam maupun diluar organisasi guna meningkatkan kesejahteraan bersama.

#### **2.1.7.4 Prinsip-Prinsip *Integrated Reporting***

Terdapat tujuh prinsip panduan yang mendasari persiapan dan penyajian *integrated reporting* menurut IIRC (2021) yaitu:

1. Fokus strategis dan orientasi masa depan *Integrated reporting* harus memberikan informasi tentang strategi perusahaan, kaitannya dengan kinerja perusahaan dalam menciptakan nilai jangka pendek, menengah dan panjang, serta pengaruhnya terhadap penggunaan modal terhadap bisnisnya.
2. Konektivitas informasi Sebuah *integrated reporting* dapat menunjukkan gambaran yang komprehensif tentang struktur, hubungan timbal balik dan ketergantungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai dari waktu ke waktu.
3. Hubungan pemangku kepentingan *Integrated reporting* dapat memberikan informasi tentang sifat dan kualitas hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan utama, termasuk tentang bagaimana dan sejauh mana organisasi memahami, mempertimbangkan, dan merespon kebutuhan dan kepentingan mereka yang sah.
4. Materialitas *Integrated reporting* harus mengungkapkan informasi tentang hal-hal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai jangka pendek, menengah dan panjang.
5. Keringkasan *Integrated reporting* harus disajikan secara ringkas dan mencakup konteks yang memadai untuk memahami strategi, tata kelola, kinerja organisasi dan prospek tanpa adanya informasi yang kurang relevan.
6. Keandalan dan kelengkapan *Integrated reporting* harus mencakup semua hal yang bersifat material, baik positif maupun negatif, secara seimbang dan tanpa kesalahan material
7. Konsistensi dan komparabilitas Informasi dalam *integrated reporting* harus disajikan diantaranya sebagai berikut:
  - a. Atas dasar yang konsisten dari waktu ke waktu; dan
  - b. Dengan cara yang memungkinkan perbandingan dengan organisasi lain sejauh hal itu melekat pada kinerja perusahaan itu sendiri dalam menciptakan nilai dari waktu ke waktu.



### 2.1.7.5 Elemen-Elemen yang Termasuk *Integrated Reporting*

Adapun ketentuan elemen *Integrated Reporting* yang telah diatur dalam IIRC (2021) yaitu :

1. *Organizational Overview dan External Environment*  
*Organizational overview* mengenai hal-hal yang berkaitan dengan visi, misi, budaya, struktur kepemilikan, dan kegiatan utama perusahaan. Sedangkan *external environment* meliputi aspek hukum, sosial, lingkungan, komersial dan politik yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah atau panjang.
2. *Governance*  
*Governance* mengenai tata kelola dan struktur perusahaan yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
3. *Business Model*  
*Business model* berisi tentang bagaimana suatu perusahaan untuk mengubah input, melalui aktivitas bisnis menjadi output dan hasil yang bertujuan untuk memenuhi tujuan strategis organisasi (*outcome*) dan menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
4. *Risks and Opportunities*  
*Risks and opportunities* mengenai identifikasi risiko dan peluang utama spesifik bagi perusahaan, yang berkaitan dengan dampak perusahaan, ketersediaan, kualitas, serta keterjangkauan yang berkelanjutan dari modal yang relevan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
5. *Strategy and Resource Allocation*  
*Strategy and resource allocation* mengungkapkan strategi yang dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuan dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang dimilikinya untuk mengimplementasikan strateginya.
6. *Performance*  
*Performance* menggambarkan kinerja yang berkaitan dengan indikator kuantitatif yang berhubungan dengan target, risiko dan peluang serta mengungkapkan signifikansi, implikasi, dan metode serta asumsi yang digunakan dalam menyusunnya. Elemen ini juga berisi tentang bagaimana pengaruh perusahaan terhadap modal yang dikelola selama satu periode.
7. *Outlook*  
*Outlook* menjelaskan pandangan perusahaan dari waktu ke waktu dengan memberikan antisipasi terhadap ketidakpastian di masa yang akan datang, menilai pengaruh potensial terhadap model bisnis dan kemampuan perusahaan di masa yang akan datang.

#### 8. *Basis of Presentation*

*Basis of presentation* berisi dasar pengungkapan untuk item yang disajikan dalam laporan tahunan sehingga tingkat kepatuhan terhadap standar informasi dapat dinilai. Pengungkapan yang berkaitan dengan ringkasannya, penentuan materialitas, batasan informasi, dan hal-hal informatif lainnya yang berguna bagi pengguna informasi keuangan.

Setiap perusahaan harus memperbaiki tata kelola perusahaan agar dapat menyusun laporan dengan elemen *integrated reporting* sehingga dapat memberikan nilai lebih tinggi dari informasi yang relevan kepada pihak luar dan mengurangi asimetri informasi (Maria et al, 2017; Hapsari et al, 2019; Sriani, 2020).

#### **2.1.7.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi Integrated Reporting**

Faktor yang mempengaruhi *integrated reporting* yaitu sebagai berikut :

1. Kepemimpinan dan budaya organisasi
2. Pemahaman dan pengakuan *stakeholders*, perusahaan harus memahami dan mengakui kebutuhan dan melaporkan informasi yang relevan.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, perusahaan harus memastikan memiliki sumber daya manusia yang memadai dan terlatih untuk melakukan penyusunan laporan *integrated reporting*.
4. Keputusan *stakeholders*, karena akan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mengamati tingkat kepuasan untuk menentukan peningkatan dalam pelaporan yang terintegritas.

### **2.1.7.7 Langkah-langkah Meningkatkan Integrated Reporting**

Menurut IIRC (2021) langkah-langkah untuk meningkatkan *integrated reporting* yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Melibatkan seluruh jajaran manajemen dalam penyusunan Laporan *integrated reporting*. Penyusunan IR harus melibatkan keseluruhan jajaran manajemen dan unit bisnis yang terkait, sehingga harus mencerminkan gambaran holistik mengenai kinerja perusahaan.
2. Meningkatkan keterlibatan *stakeholders* dalam proses penyusunan laporan IR. Perusahaan harus memastikan bahwa *stakeholders* seperti karyawan, pelanggan, dan pihak yang berkepentingan lain terlibat dalam proses penyusunan IR sehingga laporan tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja perusahaan.
3. Mengembangkan kerangka kerja yang lebih terpadu. Perusahaan harus mengembangkan kerangka kerja yang terintegritas, yang mencakup informasi keuangan maupun non keuangan yang relevan dengan kinerja sebuah perusahaan.
4. Menggunakan teknologi dan alat bantu yang tepat. Perusahaan harus menggunakan teknologi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan laporan keuangan maupun non keuangan, hal ini dapat mempermudah proses penyusunan laporan IR, dan meningkatkan akurasi dan kualitas laporan.
5. Menjalinkan kolaborasi dengan pihak lain. Perusahaan dapat menjalin kolaborasi dengan pihak lain seperti organisasi bisnis, lembaga akademik,

dan pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan *stakeholders* dan mengembangkan kerangka kerja yang lebih terpadu dan terintegritas.

Dalam meningkatkan IR ini perusahaan juga harus memastikan bahwa laporan terukur, terverifikasi, dan dapat diandalkan. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberi informasi yang akurat dan transparan.

#### 2.1.7.8 Pengukuran Pengungkapan Integrated Reporting

Menurut Kustiani (2017) pengukuran pengungkapan *Integrated Reporting*, untuk setiap indikator akan diberi skor, dimana setiap indikator pengungkapan *integrated reporting* ini dinilai berdasarkan jumlah pengungkapan. Elemen-elemen *integrated reporting* memiliki 55 indikator penilaian, diantaranya adalah sebagai berikut yaitu :

**Tabel 2.4**  
***Integrated Reporting secara Umum***

NO	DESKRIPTIF	INDIKATOR PENILAIAN
1	<i>Organization Overview and external Environmental</i>	Nilai Budaya
		Kepemilikan dan Struktur Organisasi
		Aktivitas Pasar dan Modal Bisnis
		Pernyataan Visi Misi
		<i>Reporting Boundary</i>
2	<i>Governance</i>	Struktur Kepemilikan
		Proses Untuk Membuat Keputusan Strategis
		Hukum Komersial, Sosial, Lingkungan, Politik
		Tindakan untuk mengarahkan strategi organisasi
		Implementasi Tata Kelola perusahaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan IR
3	<i>Business Model</i>	aktivitas Baru
4	<i>Risk &amp; Opportunities</i>	Materialitas

NO	DESKRIPTIF	INDIKATOR PENILAIAN
5	<i>Strategy &amp; Resource Allocation</i>	Tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
		Implementasi Rencana
		Alokasi Sumber daya berdasarkan rencana
		Konsultasi dengan <i>Stakeholders</i> dalam perumusan strategi
6	<i>Performance</i>	Adanya KPI
		Adanya KRI
		Perbaraan dengan <i>Stakeholders</i> kunci
7	<i>Outlook</i>	Resiko nyata terhadap konsekuensi ekstrim
		Harapan Manajemen
8	<i>Basic of Presentation</i>	Asumsi dasar dan risiko yang mungkin terjadi
		<i>Assurance</i>

*Sumber: integratedreporting.org*

**Tabel 2.5**  
**Indikator Pengungkapan *Integrated Reporting***

<b>Item Pengungkapan <i>Integrated Reporting</i></b>
<b>A. Tinjauan Organisasi dan Lingkungan Eksternal</b>
<p>1. Suatu laporan terintegrasi mengidentifikasi tujuan, misi, dan visi organisasi, serta memberikan konteks penting dengan mengidentifikasi hal seperti:</p> <p>a. Terkait Organisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budaya, etika, dan nilai</li> <li>• Struktur kepemilikan dan operasi</li> <li>• Aktivitas dan pasar utama</li> <li>• Penentuan posisi pasar dan lanskap yang kompetitif (mempertimbangkan faktor-faktor seperti ancaman persaingan baru dan produk atau jasa substitusi, daya tawar pelanggan dan pemasok, serta intensitas persaingan kompetitif)</li> </ul> <p>b. Posisi dalam rantai nilai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi kuantitatif utama (sebagai contoh, jumlah karyawan, pendapatan, dan jumlah negara tempat organisasi beroperasi), menyoroti, khususnya, perubahan signifikan dari periode sebelumnya</li> <li>• Faktor signifikan yang memengaruhi lingkungan eksternal dan respons organisasi tersebut.</li> </ul>
<p><b>-lingkungan eksternal</b></p> <p>Faktor signifikan yang memengaruhi lingkungan eksternal mencakup aspek hukum, komersial, sosial, lingkungan, dan konteks politik yang memengaruhi kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Hal tersebut dapat mempengaruhi organisasi secara langsung atau tidak langsung (sebagai contoh, dengan mempengaruhi ketersediaan, kualitas, dan kemampuan kapital yang dipengaruhi dan digunakan oleh organisasi).</p>

### **Item Pengungkapan *Integrated Reporting***

Faktor-faktor ini terjadi dalam konteks organisasi tertentu, dalam konteks industri atau wilayahnya, dan dalam konteks sosial atau planet yang lebih luas. Hal tersebut mungkin termasuk, misalnya:

- Kebutuhan dan kepentingan yang sah dari para pemangku kepentingan utama.
- Kondisi ekonomi makro dan mikro, seperti stabilitas ekonomi, globalisasi, dan tren industri.
- Kekuatan pasar, seperti kekuatan dan kelemahan relatif atas pesaing dan permintaan pelanggan.
- Kecepatan dan dampak dari perubahan teknologi
- Masalah sosial, seperti populasi dan perubahan demografis, hak asasi manusia, kesehatan, kemiskinan, nilai-nilai kolektif, dan sistem pendidikan
- Tantangan lingkungan, seperti perubahan iklim, hilangnya ekosistem, dan kekurangan sumber daya karena jumlahnya yang sudah mendekati batas
- Lingkungan legislatif dan peraturan tempat organisasi beroperasi
- Lingkungan politik di negara tempat organisasi beroperasi dan negara lain yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mengimplementasikan strateginya.

### **B. Tata Kelola**

Suatu laporan terintegrasi memberikan wawasan tentang bagaimana hal berikut ini ditautkan dengan kemampuannya untuk menciptakan nilai:

- Struktur kepemimpinan organisasi, termasuk keahlian dan keragaman (sebagai contoh, rentang latar belakang, jenis kelamin, kompetensi, dan pengalaman) dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan apakah persyaratan mempengaruhi desain struktur tata kelola
- Proses spesifik yang digunakan untuk membuat keputusan strategis dan untuk menetapkan serta memantau budaya organisasi, termasuk sikapnya terhadap risiko dan mekanisme untuk menangani isu integritas dan etika
- Tindakan tertentu yang telah dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mempengaruhi dan memantau arah strategis organisasi dan pendekatannya terhadap manajemen risiko
- Bagaimana budaya, etika, dan nilai organisasi tercermin dalam penggunaan dan dampaknya terhadap kapital, termasuk hubungannya dengan para pemangku kepentingan utama terkait apakah organisasi menerapkan praktik tata kelola yang melampaui persyaratan hukum
- Tanggung jawab yang diambil oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mendorong dan memungkinkan inovasi
- Bagaimana remunerasi dan insentif dikaitkan dengan penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk bagaimana hal tersebut dikaitkan dengan penggunaan oleh organisasi dan dampaknya terhadap kapital.

### **C. Model Bisnis**

Suatu laporan terintegrasi menjelaskan model bisnis, termasuk hal utama terkait:

- Masukan

<b>Item Pengungkapan <i>Integrated Reporting</i></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas bisnis</li> <li>• Keluaran</li> <li>• Hasil</li> </ul>
<p>Fitur yang dapat meningkatkan tingkat efektivitas dan kemudahan untuk dipahami deskripsi model bisnis termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi secara eksplisit unsur-unsur utama model bisnis</li> <li>• Diagram sederhana yang menyoroti unsur-unsur utama, didukung oleh uraian yang jelas tentang relevansi unsur-unsur utama bagi organisasi</li> <li>• Alur naratif yang logis mengingat keadaan khusus organisasi</li> <li>• Identifikasi para pemangku kepentingan yang kritis dan ketergantungan lainnya (sebagai contoh, bahan baku) dan faktor penting yang mempengaruhi lingkungan eksternal</li> <li>• Koneksi ke informasi yang dicakup oleh Unsur-unsur Konten lainnya, seperti strategi, risiko, dan peluang, serta kinerja (termasuk indikator kinerja utama dan pertimbangan finansial, seperti pengendalian biaya dan pendapatan).</li> </ul>
<p><b>- Masukan</b></p> <p>Suatu laporan terintegrasi menunjukkan bagaimana masukan utama berhubungan dengan kapital dimana organisasi bergantung, atau yang menyediakan sumber diferensiasi bagi organisasi, sejauh masukan tersebut material untuk memahami tingkat ketangguhan dan resiliensi model bisnis.</p> <p>fokusnya adalah pada mereka yang memiliki materi yang berkaitan dengan kemampuan untuk menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, terlepas dari mana berasalnya kapital yang dimiliki oleh organisasi. Hal ini juga dapat mencakup diskusi tentang sifat dan besarnya trade-off yang signifikan yang mempengaruhi pemilihan masukan.</p>
<p><b>- Aktivitas bisnis</b></p> <p>Suatu laporan terintegrasi menjelaskan aktivitas bisnis utama. Hal ini termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana organisasi membedakan dirinya di pasar (sebagai contoh, melalui diferensiasi produk, segmentasi pasar, jalur pengiriman dan pemasaran)</li> <li>• Sejauh mana model bisnis bergantung pada perolehan pendapatan setelah pengakuan awal penjualan (sebagai contoh, pengaturan garansi yang diperpanjang atau biaya penggunaan jaringan)</li> <li>• Bagaimana organisasi melakukan pendekatan atas kebutuhan untuk berinovasi</li> <li>• Bagaimana model bisnis telah dirancang untuk beradaptasi terhadap perubahan.</li> <li>• Bagaimana kontribusi yang dibuat untuk kesuksesan jangka panjang organisasi melalui inisiatif seperti perbaikan proses, pelatihan karyawan manajemen relasi.</li> </ul>
<p><b>- Keluaran</b></p> <p>Suatu laporan terintegrasi mengidentifikasi produk dan layanan utama organisasi. Terdapat adanya keluaran lain, seperti produk sampingan dan limbah (termasuk emisi), yang perlu didiskusikan dalam pengungkapan model bisnis tergantung pada materialitasnya.</p>
<p><b>- Hasil</b></p>

### **Item Pengungkapan *Integrated Reporting***

Suatu laporan terintegrasi menjelaskan hasil utama. Hasil adalah konsekuensi internal dan eksternal (positif dan negatif) bagi kapital sebagai akibat dari aktivitas bisnis dan keluaran organisasi. Deskripsi atas hasil mencakup:

- Kedua hasil internal (misalnya moral karyawan, reputasi organisasi, pendapatan, dan arus kas) dan hasil eksternal (sebagai contoh, kepuasan pelanggan, pembayaran pajak, loyalitas merek, dan dampak sosial dan lingkungan)
- Kedua hasil positif (yaitu yang menghasilkan peningkatan bersih atas kapital dan dengan demikian menciptakan nilai) dan hasil negatif (yaitu yang menghasilkan penurunan bersih atas kapital dan dengan demikian mengerosi nilai).
- Suatu laporan terintegrasi menyajikan hasil secara seimbang. Jika memungkinkan, laporan terintegrasi mendukung penilaian organisasi tentang penggunaan dan dampak pada kapital dengan informasi kualitatif dan kuantitatif.
- Dalam mengidentifikasi dan mendeskripsikan hasil, terutama hasil eksternal, organisasi perlu untuk mempertimbangkan kapital lebih luas daripada yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi. Misalnya, mungkin memerlukan pengungkapan dampak pada peningkatan dan penurunan kapital sepanjang rantai nilai (misalnya, emisi karbon yang disebabkan oleh produk yang diproduksi organisasi dan praktik ketenagakerjaan pemasok utama).
- Pemisahan organisasi ke dalam elemen operasi dan model bisnisnya penting untuk penjelasan yang efektif tentang bagaimana organisasi beroperasi.
- Laporan terintegrasi dari suatu organisasi dengan banyak bisnis seringkali perlu menyeimbangkan pengungkapan dengan kebutuhan untuk menurunkan kompleksitas; namun, informasi material tidak boleh dihilangkan. Pada umumnya tepat bila penyelarasan pelaporan eksternal dengan pelaporan internal juga mempertimbangkan informasi untuk manajemen puncak yang secara teratur dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

### **D. Risiko dan Peluang**

Suatu laporan terintegrasi mengidentifikasi risiko dan peluang utama yang spesifik bagi organisasi, termasuk yang terkait dengan dampak organisasi pada, dan ketersediaan, kualitas, serta keterjangkauan atas, kapital yang relevan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Termasuk mengidentifikasi:

- Sumber risiko dan peluang spesifik, yang dapat berupa internal, eksternal, atau secara umum, gabungan keduanya. Sumber eksternal termasuk yang berasal dari lingkungan eksternal. Sumber internal mencakup sumber yang berasal dari aktivitas bisnis organisasi.
- Penilaian organisasi tentang kemungkinan bahwa risiko atau peluang akan membuahkan hasil dan besaran dampaknya jika hal itu terjadi. Hal ini termasuk pertimbangan atas keadaan spesifik yang akan menyebabkan risiko atau peluang untuk membuahkan hasil. Pengungkapan tersebut akan selalu



<b>Item Pengungkapan <i>Integrated Reporting</i></b>
<p>melibatkan tingkat ketidakpastian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Langkah-langkah spesifik yang diambil untuk memitigasi atau mengelola risiko utama atau untuk menciptakan nilai dari peluang utama, termasuk identifikasi tujuan strategis, strategi, kebijakan, target, dan indikator kinerja utama terkait.</li> </ul>
<p><b>E. Strategi dan Alokasi Sumber Daya</b></p> <p>Suatu laporan terintegrasi biasanya mengidentifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan strategis jangka pendek, menengah, dan panjang organisasi</li> <li>• Strategi yang ada, atau akan diterapkan, untuk mencapai tujuan strategis tersebut</li> <li>• Rencana alokasi sumber daya dimana organisasi harus melaksanakan strateginya</li> <li>• Bagaimana mengukur pencapaian dan hasil target untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.</li> </ul> <p>Hal ini dapat mencakup penjelasan:</p> <p>a. Kaitan antara strategi organisasi dan rencana alokasi sumber daya, dan informasi yang dicakup oleh Unsur-unsur Konten lainnya, termasuk bagaimana strategi dan rencana alokasi sumber dayanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berhubungan dengan organisasi model bisnis, dan perubahan model bisnis yang diperlukan untuk menerapkan strategi yang dipilih untuk memberikan pemahaman tentang kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan</li> <li>• Dipengaruhi oleh/menanggapi lingkungan eksternal dan risiko serta peluang yang teridentifikasi</li> <li>• Memengaruhi kapital, dan pengaturan manajemen risiko yang terkait dengan kapital tersebut.</li> </ul> <p>b. Yang membedakan organisasi dalam memberikan keunggulan kompetitif dan memungkinkannya menciptakan nilai, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran dari inovasi</li> <li>• Bagaimana organisasi mengembangkan dan memanfaatkan kapital intelektual</li> <li>• Sejauh mana pertimbangan lingkungan dan sosial telah dimasukkan ke dalam strategi organisasi untuk memberikan keunggulan kompetitif</li> <li>• Fitur utama dan temuan dari keterlibatan para pemangku kepentingan yang digunakan dalam merumuskan strategi dan rencana alokasi sumber daya.</li> </ul>
<p><b>F. Kinerja</b></p> <p>Suatu laporan terintegrasi berisi informasi kualitatif dan kuantitatif tentang kinerja yang mungkin mencakup hal seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator kuantitatif sehubungan dengan target, risiko, dan peluang, yang menjelaskan signifikansinya, implikasinya, serta metode dan asumsi yang digunakan dalam menyusunnya</li> <li>• Dampak organisasi (baik positif maupun negatif) terhadap kapital, termasuk dampak material pada peningkatan dan penurunan rantai nilai terhadap kapital</li> <li>• Kondisi hubungan antar para pemangku kepentingan utama dan bagaimana</li> </ul>

<b>Item Pengungkapan <i>Integrated Reporting</i></b>
<p>organisasi menanggapi kebutuhan dan kepentingan para pemangku kepentingan utama yang sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterkaitan antara kinerja lalu dan kini, dan antara kinerja kini dan masa depan organisasi.</li> </ul>
<p>Indikator kinerja utama yang menggabungkan ukuran finansial dengan komponen lain (sebagai contoh, rasio emisi gas rumah kaca terhadap penjualan) atau narasi yang menjelaskan implikasi finansial dari pengaruh signifikan pada kapital lain dan hubungan sebab akibat lainnya (sebagai contoh, pertumbuhan pendapatan yang diharapkan sebagai hasil dari upaya untuk meningkatkan kapital sumber daya manusia) dapat digunakan untuk menunjukkan konektivitas kinerja finansial dengan kinerja terkait kapital lainnya. Dalam beberapa kasus, hal ini juga termasuk upaya menghasilkan uang dari pengaruh tertentu terhadap kapital (sebagai contoh, emisi karbon dan penggunaan air).</p>
<p><b>G. Perspektif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suatu laporan terintegrasi biasanya menyoroti perubahan yang diantisipasi sepanjang waktu dan memberikan informasi, yang dibangun di atas analisis yang baik dan transparan, tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harapan organisasi tentang lingkungan eksternal yang mungkin dihadapi organisasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang</li> <li>• Bagaimana hal tersebut di atas akan mempengaruhi organisasi</li> <li>• Bagaimana organisasi saat ini dipersiapkan untuk merespons tantangan kritis dan ketidakpastian yang mungkin muncul.</li> </ul> </li> <li>• Perhatian diperlukan untuk memastikan bahwa ekspektasi, aspirasi, dan niat yang dinyatakan oleh organisasi didasarkan pada realitas. Hal tersebut harus sepadan dengan kemampuan organisasi untuk memberikan peluang yang tersedia untuknya (termasuk ketersediaan, kualitas dan keterjangkauan kapital yang sesuai), dan penilaian realistis penentuan posisi pasar dan lanskap organisasi, serta risiko yang dihadapinya.</li> </ul>
<p>Diskusi tentang implikasi potensial, termasuk implikasinya terhadap kinerja finansial di masa depan, biasanya mencakup pembahasan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan eksternal, risiko dan peluang, beserta analisis tentang bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis</li> <li>• Ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan kapital yang digunakan atau dipengaruhi oleh organisasi (sebagai contoh, kelanjutan ketersediaan tenaga kerja yang ahli atau sumber daya alam), termasuk bagaimana hubungan utama dikelola dan mengapa hal itu penting bagi kemampuan suatu organisasi untuk menciptakan nilai sepanjang waktu.</li> </ul>
<p>Suatu laporan terintegrasi juga dapat memberikan indikator utama, indikator atau tujuan kinerja utama (key performance indicator), informasi relevan dari sumber eksternal yang diakui, dan analisis sensitivitas. Jika perkiraan atau proyeksi disertakan dalam pelaporan masa depan organisasi, maka ringkasan asumsi terkait akan berguna. Perbandingan kinerja aktual dengan target yang diidentifikasi sebelumnya memungkinkan evaluasi masa depan yang lebih mendalam.</p>
<p>Pengungkapan tentang masa depan organisasi dalam suatu laporan terintegrasi</p>

<b>Item Pengungkapan <i>Integrated Reporting</i></b>
dibuat dengan mempertimbangkan peraturan perundang- undangan atau peraturan yang menjadi subjek organisasi.
<b>H. Dasar Penyusunan dan Penyajian</b>
Suatu laporan terintegrasi menjelaskan dasar penyusunan dan penyajiannya, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan proses penentuan materialitas organisasi</li> <li>• Penjelasan tentang batasan pelaporan dan bagaimana batas tersebut ditentukan</li> <li>• Ringkasan kerangka kerja dan metode yang signifikan yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi hal material</li> </ul>
<p><b>- Ringkasan proses penentuan materialitas</b></p> <p>Suatu laporan terintegrasi mencakup ringkasan proses penentuan materialitas organisasi dan pertimbangan utama. sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskripsi singkat dari proses yang digunakan untuk mengidentifikasi hal yang relevan, mengevaluasi tingkat kepentingan dari hal tersebut dan menyaring untuk menjadi hal yang material.</li> <li>• Identifikasi peran dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan personil kunci dalam mengidentifikasi dan menentukan prioritas atas hal material.</li> <li>• Tautan ke tempat penjelasan yang lebih rinci tentang proses penentuan materialitas dapat juga disertakan.</li> </ul>
<p><b>- Batasan pelaporan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suatu laporan terintegrasi mengidentifikasi batasan pelaporannya dan menjelaskan bagaimana hal tersebut ditentukan</li> <li>2. Risiko material, peluang dan hasil yang dapat diatribusikan kepada atau terkait dengan entitas yang dimasukkan dalam entitas pelapor keuangan, dilaporkan dalam laporan terintegrasi organisasi.</li> <li>3. Risiko, peluang dan hasil yang dapat diatribusikan kepada atau terkait dengan entitas/para pemangku kepentingan lain dilaporkan dalam suatu laporan terintegrasi sejauh hal tersebut secara material mempengaruhi kemampuan entitas pelapor keuangan untuk menciptakan nilai.</li> <li>4. Isu dalam penerapan hal tersebut di atas mungkin membatasi sifat dan luas informasi yang dapat disajikan dalam suatu laporan terintegrasi. Sebagai contoh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan data yang andal sehubungan dengan entitas-entitas yang tidak dikendalikan oleh entitas pelapor keuangan</li> <li>• Ketidakmampuan inheren untuk mengidentifikasi semua resiko, peluang, dan hasil yang secara material akan mempengaruhi kemampuan entitas pelaporan keuangan untuk menciptakan nilai, terutama dalam jangka panjang.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>- Ringkasan kerangka dan metode signifikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suatu laporan terintegrasi mencakup ringkasan kerangka dan metode signifikan yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi hal material yang dicantumkan ke dalam laporan terintegrasi (sebagai contoh, standar pelaporan keuangan yang berlaku yang digunakan untuk mengumpulkan informasi finansial, formula yang ditentukan perusahaan untuk mengukur kepuasan</li> </ol>

### **Item Pengungkapan *Integrated Reporting***

- pelanggan, atau industri-kerangka dasar untuk mengevaluasi risiko).
2. ketika informasi dalam suatu laporan terintegrasi serupa dengan atau berdasarkan informasi lain yang diterbitkan oleh organisasi, maka laporan terintegrasi dibuat atas dasar yang sama dengan, atau dengan mudah dapat direkonsiliasi dengan, informasi lain tersebut. Sebagai contoh, ketika indikator kinerja utama mencakup topik yang serupa dengan, atau didasarkan pada informasi yang dipublikasikan dalam laporan keuangan atau laporan berkelanjutan (sustainability report) organisasi, maka indikator tersebut disusun atas dasar yang sama, dan untuk periode yang sama, seperti informasi lainnya.

**Sumber : Panduan Pelaporan terintegritas, IAPI (2021)**

Dari indikator tersebut maka terdapat rumus untuk mengukur *integrated reporting* yaitu dengan :

$$IR = \frac{\text{Elemen yang dilaporkan}}{\text{Total elemen integrated Reporting}}$$

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting***

Ukuran KAP yang besar cenderung lebih independen terhadap kliennya. Sehingga ukuran KAP yang besar dianggap dapat memberikan kualitas audit yang lebih tinggi karena memiliki reputasi yang tinggi. Kuantitas dan kualitas KAP besar dianggap lebih siap dan mampu dalam penerapan pelaporan terintegrasi. Kelebihan dari KAP *big four* yaitu memiliki kantor yang tersebar di seluruh dunia sedangkan KAP kecil menjalankan kegiatan audit hanya pada perusahaan lokal. KAP besar memiliki kemampuan untuk memberikan saran-saran kepada perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi perusahaannya, termasuk pelaporan terintegrasi. Penelitian ini menyatakan bahwa Ukuran KAP

berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka *Integrated Reporting*, (Ahmad & Sari, 2017).

Pada penelitian Ghani et. al. (2018) memberikan hasil bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran KAP dengan IR. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa audit independen dengan audit *firm size* yang besar akan cenderung memiliki kualitas IR yang baik.

### **2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting***

Hasil penelitian Ahmad & Sari (2017) Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka *Integrated Reporting* sehingga hipotesis terdukung.

Hasil penelitian Rahayuningsih & Pujiono (2019) Semakin besar ukuran perusahaan memicu konflik keagenan yang semakin besar pula, untuk mengurangi konflik keagenan maka perusahaan melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas seperti *integrated reporting*. Sehingga Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan.

Dan pada penelitian Herlina Rahayuningsih (2018), Utamie (2021), Lodovicus Lasdi (2022), dan Ulupui (2020) menyebutkan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Integrated Reporting*.

### **2.2.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting***

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dani & Purwanti (2021) penelitian ini didukung dengan adanya teori *stakeholders* yang mana dalam suatu perusahaan manajer wajib memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholders* yang ada. Oleh karenanya kepentingan untuk mendorong adanya keterbukaan informasi menjadi hal yang cukup penting dan dapat diterapkan dengan adanya pelaporan dari perusahaan menggunakan pengungkapan *Integrated Reporting*, hal ini dapat dilakukan dengan bantuan komite audit. Sehingga komite audit, berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka *Integrated Reporting* (IR).

Hasil penelitian dari Ahmad & Sari (2017) Komite Audit mempunyai peran dalam pengawasan terhadap aktivitas perusahaan sehingga manajemen tidak akan melakukan tindakan penyelewengan. Komite Audit juga dapat menunjukkan tugasnya dalam meminimalisir *agency problem*. Prinsip responsibilitas yang mengarahkan perusahaan untuk memberikan informasi yang sebenarnya dapat dijalankan oleh Komite Audit. Fungsi Komite Audit memberikan dorongan kepada manajemen untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien sehingga mendorong pengungkapan informasi perusahaan, termasuk laporan tahunan perusahaan yang sesuai dengan *Integrated Reporting*. Sehingga Komite audit berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*.

Selain itu pada penelitian Ratih Widhiastuti (2022) Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan terintegrasi (*Integrated Reporting*).

#### **2.2.4 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting***

Pada penelitian Ahmad & Sari (2017) Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan ukuran KAP mempunyai peran dalam pengawasan keseluruhan aktivitas perusahaan. Masing-masing dari elemen tersebut saling bekerjasama dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam perusahaan termasuk *agency problem* dan informasi asimetri. Selain itu, perusahaan mampu mewujudkan transparansi dan responsibilitas dalam pengungkapan informasi terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam laporan terintegrasi. Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka *Integrated Reporting* (IR).

Selain itu, pada penelitian Rezeki & Ahmar (2022) mengatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka asimetri informasi juga semakin tinggi dan konflik keagenan yang dihadapi perusahaan juga besar, sehingga untuk mengurangi konflik keagenan, maka perusahaan akan semakin luas dalam melakukan pengungkapan informasi oleh komite audit. Maka Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting*.

### 2.2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat berfungsi sebagai dasar pendukung dalam melakukan penelitian ini. Telah dilakukan penelitian oleh para peneliti sebelumnya terkait *integrated reporting*, tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil yang digunakan oleh penelitian terdahulu selain itu juga melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dengan variabel sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode
1	Ahmad & Sari, 2017	Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP terhadap Tingkat keselarasan Laporan Tahunan dengan Kerangka <i>Integrated Reporting</i> (perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2015)	berdasarkan dari hasil penelitian ini maka, ditemukan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap IR, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan IR, dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap tingkat keselarasan laporan tahunan dengan kerangka IR.	Kuantitatif
2	Dani & Purwanti, 2021	Pengaruh Jumlah dan Keahlian Komite Audit terhadap Pengungkapan <i>Integrated Reporting</i> pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	komite audit berpengaruh secara positif terhadap Penangkapan dengan meningkatkan Jumlah Komite audit maka <i>Integrated Reporting</i> akan mengalami peningkatan secara nyata.	Kuantitatif



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode
3	Novaridha , 2017	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Elemen-elemen <i>Integrated Reporting</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap unsur pelaporan terintegrasi dalam laporan tahunan perusahaan non keuangan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 2015	Kuantitatif
4	Kurnianto, Purwohedhi & Prihatni, 2020	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI <i>INTEGRATED REPORTING</i>	Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian, rapat komite audit dan otoritas komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap (IR). Hal ini menunjukkan perusahaan akan memaksimalkan praktik IR apabila komite audit memiliki frekuensi rapat yang tinggi serta diperluasnya otoritas dari komite audit. Sementara, ukuran KAP dan tekanan pemangku kepentingan tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap IR.	Kuantitatif
5	Rahayuningsih & Pujiono, 2019	PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP <i>INTEGRATED REPORTING</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integrasi pelaporan, leverage tidak berpengaruh pada pelaporan terintegrasi, dan kepemilikan struktur yang diprosikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional	Kuantitatif

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode
			pelaporan terintegrasi yang terkena dampak negatif.	
6	Rejeki & Ahmar, 2022	STUDI LITERATUR REVIEW : PENTINGNYA PENERAPAN <i>INTEGRATED REPORTING</i> (IR)	Penelitian ini membuktikan bahwa “Dewan Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP secara simultan kesemuanya berpengaruh terhadap <i>Integrated Reporting</i> ”. Di sisi lain “secara parsial hanya Ukuran Perusahaan yang berpengaruh terhadap <i>Integrated Reporting</i> ”.	Kuantitatif
7	Kustiani,2017	PENERAPAN ELEMEN-ELEMEN <i>INTEGRATED REPORTING</i> PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum, perusahaan yang terdaftar di BEI telah memenuhi rata-rata 50% dari elemen yang dibutuhkan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek telah secara sukarela melaporkan informasi yang diperlukan termasuk informasi keuangan dan beberapa informasi non-keuangan tentang kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan.	Kuantitatif

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode
8	Utami, Amyulianty & Astutii, 2022	PELAPORAN YANG TERINTEGRASI DI REV. 4.0: SIAPKAH BUMN DI INDONESIA?	Penelitian ini memiliki implikasi untuk perusahaan dalam mempertimbangkan penerapan integrasi pelaporan dalam pengambilan keputusan terkait investasi baik jangka pendek dan jangka panjang, sehingga dapat mendukung perusahaan strategi pembangunan berkelanjutan.	Kuantitatif
9	Utamie, 2021	DETERMINAN IMPLEMENTASI <i>INTEGRATED REPORTING</i> PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR	Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Komite Audit dan <i>leverage</i> dengan <i>Integrated Reporting</i> , sedangkan variabel Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terdapat pengaruh positif signifikan terhadap <i>Integrated Reporting</i>	Kuantitatif
10	Pramesti, Rahmawati, 2022	Pengaruh <i>Integrated Reporting</i> dan <i>Green Innovation</i> terhadap Kinerja Perusahaan	penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>integrated reporting</i> berpengaruh positif terhadap variabel kinerja perusahaan, variabel <i>green innovation</i> tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja perusahaan. Begitu pula dengan hasil variabel kontrol <i>green intellectual capital</i> berpengaruh negatif terhadap variabel kinerja perusahaan, <i>green supply chain management</i> , <i>green organizational culture</i> tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja	Kuantitatif



No	Nama dan Tahun Penelitian	Komite Audit	Ukuran Perusahaan	Ukuran KAP	Profitabilitas	Leverage	Kepemilikan Institusional	Tekanan Stakeholders	Jumlah dan Keahlian Audit	Struktur Kepemilikan	Rapat Komite Audit	Tekanan Pemangku Kepentingan	Kinerja Perusahaan	Green Innovation	Integrated Reporting
2	Dani & Purwanti, 2021	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓
3	Novaridha, 2017	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓
4	Kurnianto, Purwotedi & Prihatni, 2020	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
5	Rahayuningsih & Pujiono, 2019	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
6	Rejeki & Ahmar, 2022	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
7	Kustiani, 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
8	Faudah & Kulsum, 2021	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓
9	Utamie, 2021	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
10	Pramessti, Rahmawati, 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
11	Yayang Siti Hardiyanti, 2023	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Keterangan :

Tanda (✓) = Diteliti, Tanda (-) = Tidak diteliti

Berdasarkan dari tabel penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Rudy Ahmad & Ratna Candra Sari tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, Terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Kerangka *Integrated Reporting*. Terdapat persamaan dengan peneliti pada variabel independen seperti Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP dan variabel dependen yaitu Pengungkapan *Integrated Reporting*. Memiliki perbedaan yaitu tempat penelitian, pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021, sedangkan pada penelitian Rudi Ahmad & Ratna Candra Sari melakukan penelitian pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2015.

Penelitian Sri Desi Ramadhani & Dr. Lilik Purwanti, Ak., CSRS., CA tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Jumlah Dan Keahlian Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Terdapat persamaan dengan peneliti pada variabel dependen yaitu Pengungkapan *Integrated Reporting*. Dan memiliki perbedaan yaitu pada variabel independen yaitu Jumlah dan Keahlian Komite Audit, dan Perbedaan sektor penelitian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penelitian Ira Astria Novaridha pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Elemen-elemen *Integrated Reporting*. Terdapat persamaan dengan peneliti yaitu variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan dan persamaan variabel dependen yaitu Pengungkapan *Integrated Reporting*. Memiliki perbedaan yaitu pada variabel dependen seperti Kepemilikan Institusional dan pada penelitian Ira Astria Novaridha meneliti Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sedangkan penelitian peneliti pada Perusahaan Sektor *consumer non cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.

Penelitian Akbar Kurnianto, Unggul Purwohedhi dan Ridha Prihatni tahun 2020 yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Integrated Reporting* yang memiliki cakupan penelitiannya Ukuran Kantor Akuntan Publik, Pemangku Kepentingan, Rapat Komite Audit terhadap elemen IR. Maka Terdapat persamaan dengan peneliti yaitu variabel independen Ukuran KAP dan variabel dependen *Integrated Reporting*. Dan memiliki perbedaan pada variabel Pemangku Kepentingan, Rapat Komite Audit. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada perusahaan Sektor *consumer non cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021, sedangkan pada penelitian Akbar Kurnianto, Unggul Purwohedhi dan Ridha Prihatni melakukan penelitian pada perusahaan real estate dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2017.

Penelitian Rahayu Ningsih dan Pujiono tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan terhadap *Integrated Reporting*. Memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu pada variabel independen seperti Ukuran Perusahaan dan variabel dependen yaitu *Integrated Reporting*. Sedangkan perbedaan terletak pada variabel independen *Leverage* dan Struktur Kepemilikan dan pada penelitian Rahayu Ningsih dan Pujiono meneliti pada perusahaan yang termasuk dalam IDX30 periode tahun 2014-2016 sedangkan peneliti pada Perusahaan Sektor *consumer non cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.

Penelitian Dewi Rejeki dan Nurmala Ahmar tahun 2022 yang berjudul Pentingnya Penerapan *Integrated Reporting*, yang memiliki cakupan penelitian Dewan Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP berpengaruh terhadap pengungkapan *Integrated Reporting*. Sehingga memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel independen seperti Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP dan variabel dependen yaitu pengungkapan *Integrated Reporting*. Kemudian memiliki perbedaan yaitu pada variabel independen seperti Dewan Komisaris dan Struktur Kepemilikan.

Penelitian Nur Aisyah Kustiani tahun 2017 yang berjudul Penerapan Elemen-elemen *Integrated Reporting* pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat samaan dengan penelitian ini yaitu variabel dependen



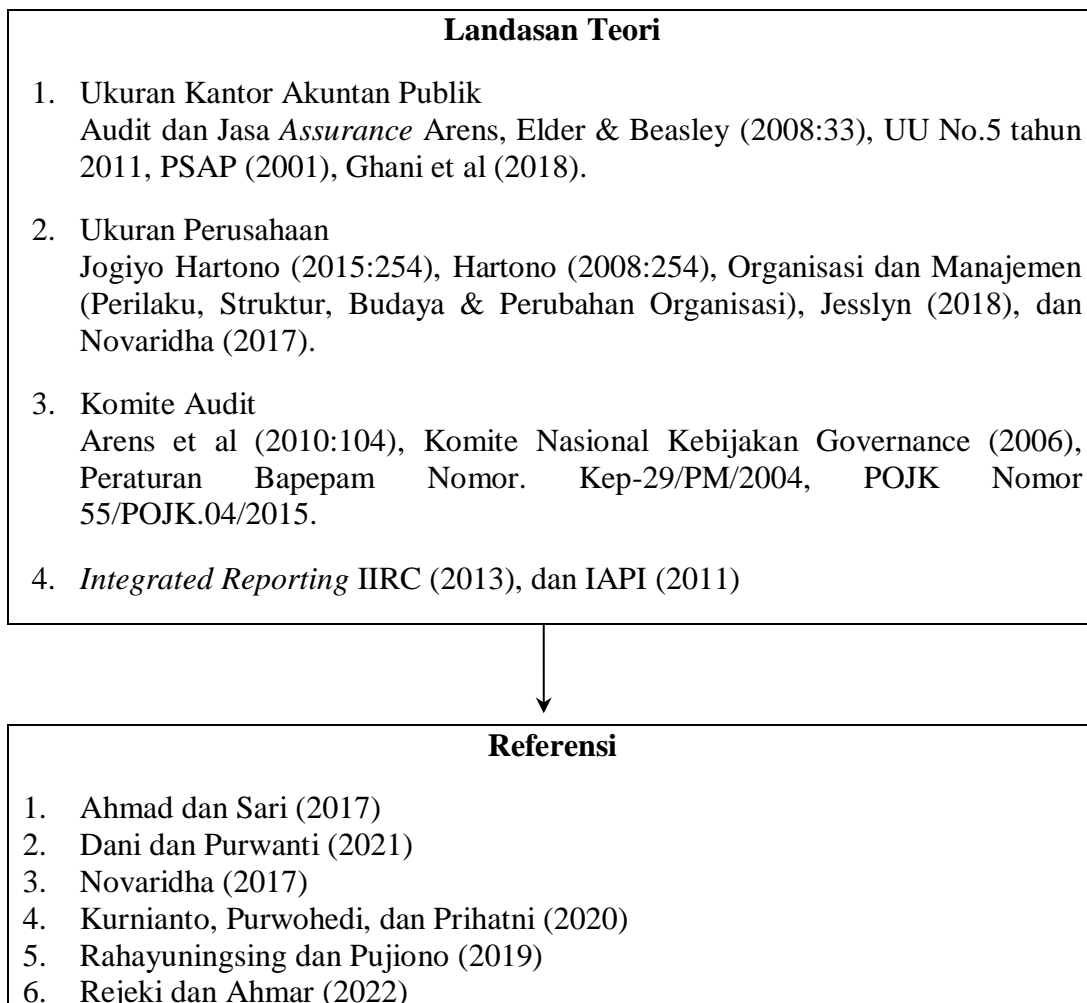
*Integrated Reporting*. Sedangkan memiliki perbedaan yaitu seluruh variabel independen dan tahun penelitian.

Penelitian Luk Luk Fuadah dan Umi Kulsum tahun 2021 yang berjudul Tinjauan Atas Implementasi dalam Pengungkapan *Integrated Reporting* di Indonesia, yang mencakup pengaruh anggota Dewan Independen, Ukuran Dewan, Board Gender, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Auditor Eksternal, Komite Audit, Rapat Komite Audit, Tekanan Stakeholder terhadap IR. Sehingga memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada variabel independen seperti Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan variabel dependen *Integrated Reporting*. Dan terdapat perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian Luk Luk Fuadah dan Umi Kulsum yaitu variabel dependen seperti Dewan Independen, Ukuran Dewan, Board Gender, Kepemilikan Institusional, profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Auditor Eksternal, Rapat Komite Audit, Tekanan *Stakeholders* dan perbedaan studi kasus penelitian.

Penelitian Dara Nida Utami tahun 2021 yang berjudul Determinasi Implementasi *Integrated Reporting* pada Perusahaan Manufaktur, mencakup pengaruh Komite Audit dan *leverage* dengan *Integrated Reporting*, sedangkan variabel Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terdapat pengaruh positif signifikan terhadap *Integrated Reporting*. Terdapat persamaan penelitian Dara Nida Utami dengan penelitian peneliti yaitu pada variabel independen seperti Komite Audit dan *Integrated Reporting*. dan terdapat perbedaan yaitu variabel dependen *leverage* dan perbedaan tahun penelitian.

Penelitian Grahita Iga Pramesti dan Sistya Rachmawati tahun 2022 yang berjudul Pengaruh *Integrated Reporting*, *Green Innovation*, *Green Intellectual Capital*, *Green Supply Chain Management*, dan *Green Organizational Culture* terhadap Kinerja Perusahaan. Maka terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu studi kasus penelitian pada perusahaan Sektor *consumer non cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Dan terdapat perbedaan terhadap variabel lain selain *Integrated Reporting*.

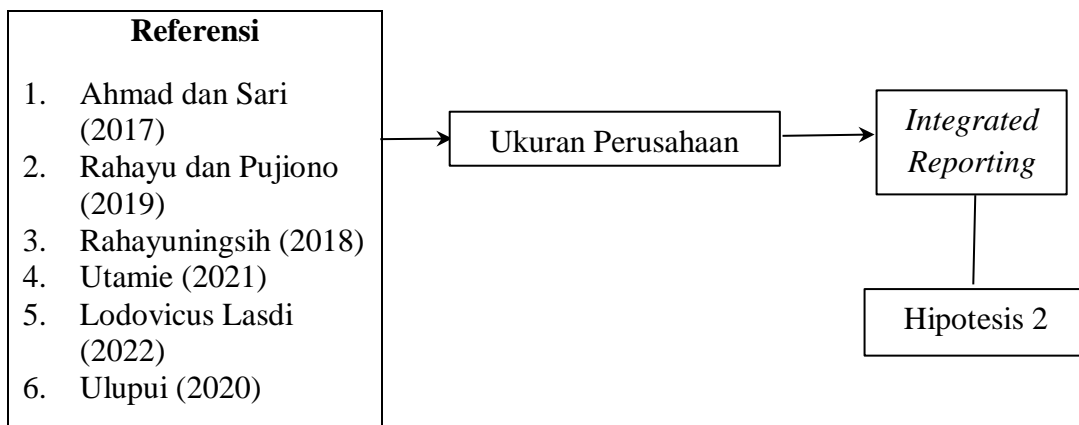
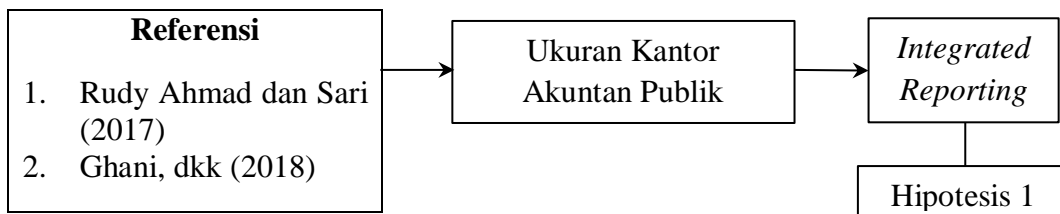
#### 2.2.6 Bagan Kerangka Pemikiran

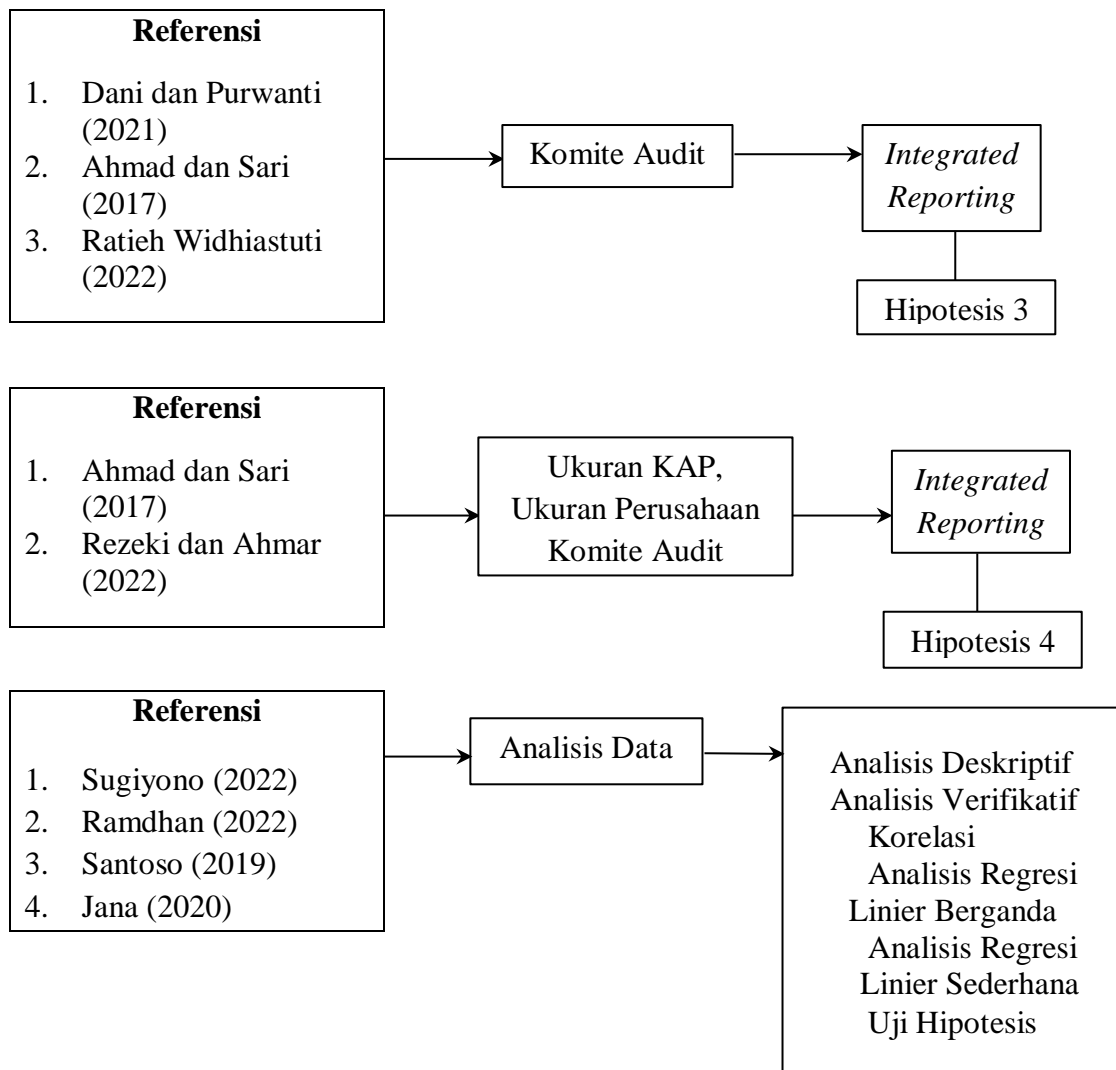


7. Kustiani (2017)
8. Utami, Amyulianthy, dan Astuti (2022)
9. Utamie (2021)
10. Primasti dan Rachmawati (2022)

**Data Penelitian**

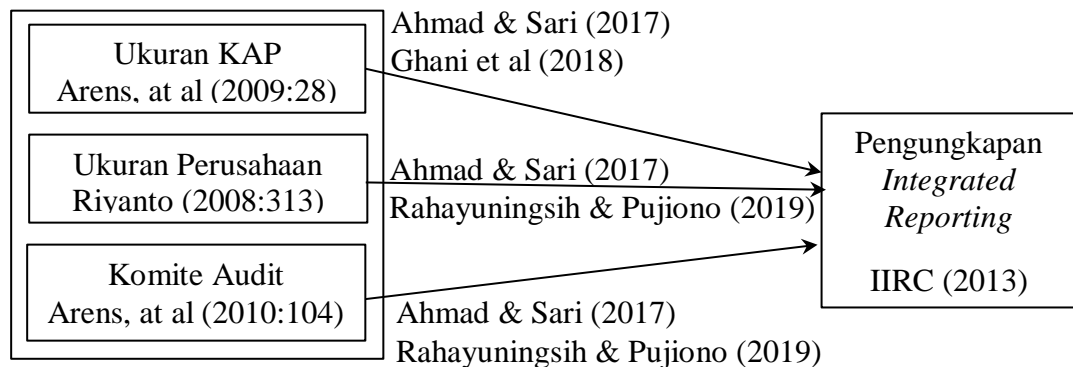
1. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical* sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
2. Data dari *website* BEI dan *website* masing-masing perusahaan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Integrated Reporting*.





**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**

### 2.2.7 Paradigma Penelitian



**Gambar 2.2**  
**Paradigma Kerangka Penelitian**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:242) menyatakan mengenai definisi Hipotesis sebagai berikut :

“Hipotesis adalah jawaban tidak mutlak atau bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis perlu melalui pengujian untuk diuji dan dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang telah diperoleh dari sampel penelitian.”

Berdasarkan kerangka pemikiran dapat ditarik hipotesis sementara yaitu sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting* perusahaan.

Hipotesis 2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting* perusahaan.

Hipotesis 3 : Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting* perusahaan.

Hipotesis 4 : Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting* perusahaan.